

Judul : Tarif PPN Jadi 12 Persen - Kaji Dulu, Biar Nggak Susahkan Masyarakat
Tanggal : Minggu, 19 Mei 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Tarif PPN Jadi 12 Persen

Kaji Dulu, Biar Nggak Susahkan Masyarakat

ANGGOTA Komisi XI DPR Mukhamad Miskhan menyoroti tenggat waktu kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen yang tinggal menghitung bulan atau mulai 2025. Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini dinilai perlu ada kajian mendalam.

Dia bilang, saat Undang-Undang HPP itu dibahas di parlemen, pemerintah minta (tarif PPN) naik karena menganggap bahwa tarif *value added tax*, pajak pertambahan nilai yang 10 persen itu masih dianggap terlalu rendah. Sehingga pemerintah menaikkan 1 persen (menjadi 11 persen pada 1 April 2022) kemudian minta sebelum 2025 sudah naik menjadi 12 persen.

"Nah ketika naik 12 persen itu, saya minta dilakukan kajian yang mendalam. Kalau kajian pemerintah menganggap itu perlu ya sudah silakan (naikkan tarif PPN)," kata politisi Fraksi Golongan Karya itu.

Dia menjelaskan, upaya melakukan kajian seksama sebelum penetapan kenaikan tarif PPN penting dilakukan. Jenis pajak pertambahan nilai menengah sektor konsumsi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh sektor tersebut.

"Indonesia ini adalah negara yang pertumbuhan ekonominya ditopang oleh konsumsi. Yang disasar oleh pajak pertambahan

itu apa sih? Ya konsumsi! *Tax to consume*, kemampuan orang untuk melakukan konsumsi terhadap suatu barang yang merupakan objek pajak itu yang dikenakan," lanjutnya.

UU HPP menyebutkan, Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu: a. sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; b. sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Sementara, anggota Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menyebut, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan memukul mundur perekonomian masyarakat. Rencana pemerintah ini kontraproduktif dengan kondisi daya beli masyarakat saat ini.

"Rencana kenaikan PPN sangat menghimpit masyarakat. Ini akan memukul mundur daya beli masyarakat yang saat ini dihadapkan pada berbagai tekanan perekonomian," buka Ecky.

Menurutnya, beberapa tahun terakhir merupakan tahun tersulit yang dihadapi oleh masyarakat. Berbagai macam guncangan mengakibatkan pendapatan mereka tergerus karena gejolak perekonomian. Seperti gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak dan harga bahan pokok. "Belum lagi persoalan tingginya suku bunga kredit. Daya beli masyarakat benar-benar menghadapi

pelemahan," tegasnya.

Survei konsumen yang dilakukan BI menunjukkan, rasio konsumsi kelompok dengan pengeluaran di bawah Rp 5 juta sebagian besar mengalami penurunan. "Penurunan paling dalam dicatatkan oleh kelompok pengeluaran Rp 2,1 juta - Rp 3 juta, diikuti kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta - Rp 5 juta. Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat semakin terpusuk," ungkap Ecky. ■ KAL